

# **Efektifitas Penyelenggaraan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong**

**Agreen P. Johanis**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui efektifitas sitem informasi administrasi kependudukan dapat mempengaruhi penyelenggaraan sitem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Catatan Sipil Kota Sorong. b) Untuk mengetahui pengaruh sitem informasi administrasi kependudukan terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan di Kota Sorong. c) Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dalam penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Sorong. Metodologi dalam penelitian ini adalah deksriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menguraikan karakteristik dari suatu keadaan. Metode ini tertujuh pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Sorong, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang. Teknik pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara. teknik pengolah data non statistik yaitu menganalisa data yang satu dengan data yang lain, kemudian menarik kesimpulan atas hasil analisa data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas penyelenggaraan SIAK sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

**Kata Kunci :** Efektifitas, SIAK, Administrasi Kependudukan

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistic peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan public tanpa diskriminasi.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Sorong dimana dalam pelaksanaanya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran

penduduk. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Deni Mambtisauw,dkk (2017) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, kami sedang melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah sebagaimana telah tertuang di dalam Propeda Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2012 dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem kelembagaan aparatur pemerintah daerah, manajemen pemerintahan umum dan pembangunan agar efisien dan efektif di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi kegiatan penataan kembali struktur organisasi, mekanisme kerja, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesesuaian antara tugas dan fungsi, struktur organisasi dan kualifikasi maupun jumlah pegawai, serta terbangunnya hubungan kerja antar organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Dan untuk melaksanakan tugas pengelolaan termasuk 72 pertambahan dalam mewujudkan misi meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, maka salah satunya dibentuk Distrik Kepulauan Ayau sebagai pengembangan dari Bagian Sekretariat Daerah”.

Salah satu alasan yang melandasi pemilihan wilayah ini sebagai lokasi penelitian adalah bahwa Kota Sorong memiliki permasalahan penduduk yang kompleks. Kondisi tersebut di perparah dengan kurang antusiasnya penduduk dalam mendukung proogram pemerintah ini. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi pemerintah Kota Sorong kepada masyarakatnya, maka judul yang di angkat dalam penulisan ini adalah ” *Efektifitas Penyelenggaraan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sorong*”. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Untuk mengetahui efektifitas sistim informasi administrasi kependudukan dapat mempengaruhi penyelenggaraan sistim informasi administrasi kependudukan pada Dinas

Catatan Sipil Kota Sorong. b) Untuk mengetahui pengaruh sistim informasi administrasi kependudukan terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan di Kota Sorong. c) Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dalam penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Sorong.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi dalam penelitian ini adalah deksriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menguraikan karakteristik dari suatu keadaan. Metode ini tertujuh pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Sorong, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang. Teknik pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara. teknik pengolah data non statistik yaitu menganalisa data yang satu dengan data yang lain, kemudian menarik kesimpulan atas hasil analisa data tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAAN**

### **Efektifitas Penyelenggaraan SIAK**

System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sebuah system informasi untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan. SIAK merupakan salah satu elemen dari Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. Dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Sistem informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu keatuan”. Di Kota Sorong lini terdepan SIAK dipegang oleh para operator yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.. Lini berikutnya adalah supervisor. Supervisor ini mengendalikan para operator, baik operator pendaftaran penduduk WNI, operator penduduk WNA maupun operator Pencatatan Sipil.

Di Kota Sorong SIAK dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2007, Dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2006 pasal 82 (2) disebutkan “Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di sebutkan Faktor-faktor efektifitas penyelenggaraan SIAK yaitu : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 2) Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap dan mutakhir dan mudah diakses; 3) Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui system pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

### **Pengaruh SIAK Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan**

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktifitas kehidupan di Indonesia. Administrasi Kependudukan dengan sistem baru tersebut bila berjalan sesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan pembangunan (antara lain merupakan komponen penting dalam pembuatan indikator). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (**SIAK**) pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari.

Biodata akan menjadi data awal gambaran penduduk dengan berbagai karakteristiknya, seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan sebagainya. Perkembangannya diikuti dengan keterangan kependudukan seperti lahir, mati, pindah, dan datang (Lampid). Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP mutakhir dan pelayanan publik akan lebih mudah dan cepat melalui komputersasi informasi kependudukan. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah : 1) Aspek Landasan Hukum ; Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan dokumen kependudukan yang sarat bernilai hukum, adalah sangat fundamental, karena terkait dengan existensi negara (NKRI) sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam

konstitusi UUD 1945. Di samping juga hendaknya dapat menjamin perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum berdomisili di wilayah NKRI dalam mengakses hak-haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai penduduk Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, haruslah tidak diskriminatif, jelas (tidak multi interpretatif), tidak saling bertentangan (hendaknya sinergis) dengan peraturan perundang-undangan lain dalam pelayanan publik, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian penduduk, serta dapat berfungsi mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang “modern” dengan Good Governance dan Clean Government. 2 ) Aspek Kelembagaan dan SDM; Penataan dan penyiapan dukungan kelembagaan dan SDM, memiliki makna strategis di dalam mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir 1. 3) Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan ; Penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna (“appropriate”) mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif lama (“long life” tidak mudah “face out”), efisien (tidak “over investment” atau “under investment”), aman (“secure”) mudah dioperasikan (“user friendly”) dan murah pemeliharannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah tanah air dengan support yang selalu tersedia dan relatif cepat. 4) Aspek Registrasi; Registrasi merupakan kegiatan awal dan kunci di dalam mewujudkan tertib dokumen kependudukan. Untuk itu mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang dirancang dan diterapkan dalam pelayanan dokumen kependudukan haruslah jelas, tidak berbelit-belit agar mudah difahami penduduk (sebagai pemohon) maupun operator (registrar) sebagai penyedia layanan, serta dapat dijamin penegakkannya (dipatuhi dan tertib). 5) Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat; Kondisi demografi Kota Sorong , menginformasikan kepada kita tentang sebaran penduduk dan kesadaran/wawasan pemahaman masyarakat yang sedemikian rupa kualitasnya terhadap makna dokumen kependudukan, sehingga derajat ketertiban dalam kepemilikan dokumen relatif masih kurang. 6 ) Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan; Untuk mempercepat proses penerapan NIK Nasional kepada seluruh penduduk Indonesia, peranan Bank Data Kependudukan sangatlah penting.

### **Kendala atau Hambatan Penyelenggaraan SIAK**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam tugas pokoknya menyusun sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan yang dalam pelaksanaan

pelayanan telah ditemui beberapa kendala yakni : 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan identitas dirinya, sehingga kedisaran untuk membuat KTP (identitas diri masih kurang); 2) Sistem pelaporan data kependudukan(*data smart/eksekutif*) yang masih belum berfungsi optimal.; 3) Masih belum dimilikinya mekanisme/sistem yang sistematis dalam bentuk standarisasi prosedur penanganan troubleshooting yang terjadi ketika SIAK terimplementasikan; 4) Sistem pelaporan data kependudukan(*data smart/eksekutif*) yang masih belum berfungsi optimal serta proses registrasi penduduk membutuhkan waktu proses yang lama dan terkadang tidak efektif; Belum mampu melakukan registrasi secara menyeluruh dalam registrasi secara online; 5) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang keadministrasian kependudukan; 6) Di sisi lain dibidang politik akan sangat mudah khususnya dalam memperoleh DPT. Selama ini registrasi penduduk masih lemah sehingga akurasi dari DPS tidak terjamin pada gilirannya DPT akan kacau.

### **Upaya Yang Dilakukan Dinas Kependudukan Kota Sorong**

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang dimaksud serta Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka langkah selanjutnya adalah mengupayakan percepatan Penerbitan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan mengenai pencantuman NIK pada dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya. Dengan demikian penerapan NIK untuk pelayanan publik sudah mulai diterapkan oleh Departemen dan Lembaga Non Departemen yang direncanakan, untuk itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong adalah : 1) Mengupayakan percepatan akurasi database kependudukan berbasis NIK Nasional di Kabupaten/Kota Provinsi dan nasional, guna terwujudnya penyediaan data kependudukan. 2) Membantu tersedianya data kependudukan untuk keperluan Pemilu/Pemilukada. 3) Mengupayakan percepatan pembangunan komunikasi data antara Departemen Dalam Negeri dengan Departemen/Lembaga Non Departemen dalam rangka penerapan NIK dan pemanfaatan data Kependudukan 4) Meningkatkan Pemahaman masyarakat dengan melakukan penyuluhan, pembinaan dan bekerja sama dengan instansi (KPU dan Kantor Statistik) terkait dalam mengidentifikasi data penduduk. 5) Perlunya diadakan kegiatan pengembangan sistem identifikasi terhadap penduduk baik Penduduk Asli atau Pendatang secara biometrik agar dapat meniadakan penggandaan dan penyalahgunaan identitas

untuk keperluan pribadi maupun kelompok yang merugikan negara dan masyarakat; 6) Perlunya suatu kegiatan yang dapat menghasilkan suatu sistem yang dapat merangkum, memfilter, memilah data kependudukan dan kemudian data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk laporan yang dikehendaki tanpa mengganggu kinerja proses transaksional kependudukan; 7) Perlunya kegiatan pengembangan sistem komunikasi yang bertujuan penanganan *troubleshooting/helpdesk* di *datacenter* untuk pelayanan SIAK; 8) Memasang petunjuk - petunjuk tentang persyaratan, prosedur perolehan dan informasi - informasi lainnya di tempat pelayanan; 9) Membina dan membimbing petugas agar selalu memberikan pelayanan dengan sopan dan rama.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Berdasarkan uraian diatas bahwa Efektifitas penyelenggaraan SIAK sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. 2) Perlu adanya komitmen untuk pengembangan SIAK yang berakar pada perubahan budaya kerja tradisional menjadi elektronik dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama e-Government yaitu melakukan perbaikan mutu pelayanan pada masyarakat, dengan adanya SIAK diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi yang bersifat strategis; 3) Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik”, 4) Pengembangan SIAK untuk mendukung “Good Governance” menjadi keharusan terutama untuk mendukung proses kependudukan di Indonesia; 5) Manfaat yang didapat dari pengembangan SIAK antara lain untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem

ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya; 6) Adapun beberapa kelebihan yang diharapkan nantinya bisa berkembang setelah terciptanya SIAK adalah : (a). Memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan; (b). Mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya; (c). Menyelenggarakan administrasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat; (d). Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boles, Frank. 2005. *Selecting and Appraising Archives & Manuscripts. Ottawa: Society of American Archivists,*
- Dahlan Beletin. 1992. Arsip Nomor 11 latar Belakang Lahirnya Kearsipan kartu Kendali , Andri, Jakarta,
- Enri S. Siswosoediro 1989. *“ Mengurus Surat – Surat Kependudukan ( Identitas Diri \_ dari Akta Kelahiran, KTP, Paspor, SKCK, Akta Perkawinan dan Perceraian sampai Surat Kematian Jakarta*
- Hasibuan, Zainal A. 2007. *Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Goernment Untuk Pemda. Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3-No 1-April*
- Ibrahim Indrawijaya, 1993. *Pemimpin Prilaku Organisasi, CV. Rajawali, Jakarta,*
- I Nyoman Budijaya 1987. *“ Suatu Tinjauan Yuridis Catatan Sipil Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta*
- Jay Kennedy and Cherryl Schauder, 1998. *Records management: A Guide to Corporate Record Keeping, Melbourne. Longman,*
- Koswara, E. 2002. *“ Teori Pemerintahan Daerah. Jakarta : Institut Pemerintahan Press,*
- Komnas HAM. 2005. *“ Pokok – Pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional, Komnas HAM, Jakarta,*
- Leonard d. White, 1991. *dasar-dasar organisasi dan manajemen, galia indonesia, Jakarta,*
- Mambtisauw, D., Suaib, H., & Purnomo, A. (2017). EFEKTIVITAS DAN EFISIEN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DI DISTRIK KEPULAUAN AYAU. *Gradual*, 6(2), 66-83.



Martono, Boedi, 1995. *Administarsi Kearsipan, yayasan Pendidikan Pekerjaan Semua Bidang*, CV. Insan Harapan, Grafika, Makasar,

Nazir, Muh. 2003. “*Metodologi Penelitian*”. Ghalia Indonesia. Jakarta,

Peter Walne (ed), 1988. *Dictionary of Archival Terminology*, Munchen: KG. Saur, ,

Sulistyo-Basuki. 2003. “*Manajemen Arsip Dinamis: Pengantar Memahami dan Mengelola Informasi dan Dokumen*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Syefani Rahma Deski 2009 “ Penduduk, Masyarakat dan Kebudayaan dalam website : [www.www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/gdr/ISD-2.doc](http://www.www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/gdr/ISD-2.doc),